

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat di pedesaan adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi syarat terciptanya pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat bukan sekadar kehadiran fisik dalam kegiatan, melainkan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek sekaligus aktor utama pembangunan, bukan semata-mata objek dari program-program yang datang dari atas.

Di antara berbagai wadah partisipasi masyarakat yang ada di tingkat desa, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu yang paling mengakar dan berkelanjutan. PKK telah lama menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memberdayakan perempuan desa melalui pendekatan berbasis komunitas yang menjangkau hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia. PKK merupakan gerakan nasional pembangunan masyarakat yang pertumbuhan dan pengelolaannya berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat. Legitimasi PKK sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang menjadikan PKK sebagai bagian integral dari strategi pembangunan yang berorientasi pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Zuhri & Mursyidah (2024, hlm. 7) menegaskan bahwa PKK memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup.

PKK tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial semata, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan nonformal yang secara kolektif mengembangkan

kapasitas perempuan desa. Sihotang (2021, hlm. 26) menyatakan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat berbasis keluarga. Di dalam struktur PKK, kader memegang peran sentral sebagai penggerak program-program pemberdayaan. Mereka bertugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan PKK dilaksanakan secara serasi dan terpadu di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma, sehingga jangkauan program PKK sungguh-sungguh menyentuh lapisan masyarakat yang paling dasar.

Namun di balik besarnya kontribusi kader PKK dalam pembangunan masyarakat, terdapat realitas yang sering kali luput dari perhatian kajian akademik maupun kebijakan. Para kader PKK kerap menjalankan peran yang sangat kompleks dan berlapis. Sebagai kader PKK, mereka dituntut untuk menjadi agen perubahan yang menggerakkan partisipasi masyarakat, merancang dan melaksanakan program pemberdayaan, serta hadir dalam berbagai kegiatan organisasi yang tidak jarang berlangsung sepanjang hari. Pada saat yang bersamaan, mereka juga harus menjalankan peran domestik sebagai istri yang mendukung suami, ibu yang mengasuh dan mendidik anak, serta pengelola kebutuhan rumah tangga yang memastikan seluruh keperluan keluarga terpenuhi. Bahkan sebagian dari mereka juga menjalankan pekerjaan produktif sebagai pedagang, guru, tenaga kesehatan, atau wirausaha untuk menopang perekonomian keluarga. Kondisi inilah yang melahirkan apa yang dikenal sebagai peran ganda, yaitu situasi di mana seorang individu, khususnya perempuan, harus membagi energi, perhatian, dan sumber daya secara simultan pada dua ranah kehidupan, yaitu ranah sosial dan ranah domestik.

Persoalan peran ganda ini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari peran ganda perempuan karir pada umumnya. Kegiatan PKK secara umum dipandang sebagai bentuk pengabdian sosial, bukan pekerjaan formal yang memberikan imbalan finansial. Artinya, motivasi kader lebih bersifat sukarela dengan orientasi pengabdian kepada masyarakat. Kondisi ini menciptakan lapisan

tekanan yang unik, kader dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran sosialnya bukan karena ada insentif materi yang memadai, melainkan karena rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap komunitas. Di sisi lain, keluarga pun tetap mengharapkan kehadiran penuh dari sang ibu dan istri. Ketika kedua tuntutan ini tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai dari keluarga maupun lingkungan sosial, risiko kelelahan berlapis (*burnout*) sangat nyata dan dapat berdampak pada penurunan kualitas program PKK secara keseluruhan.

Persoalan ini semakin kompleks ketika ditempatkan dalam konteks sosial budaya lokal. Di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Ciamis, nilai-nilai budaya Sunda yang menekankan keharmonisan keluarga dan gotong royong memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk ekspektasi sosial terhadap perempuan. Meskipun nilai-nilai tersebut secara normatif bersifat positif, dalam praktiknya informan sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang harus mendahulukan keluarga di atas segala hal, termasuk di atas peran sosial yang mereka jalankan secara sukarela.

Desa Karangampel di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu contoh nyata di mana dinamika peran ganda kader PKK berlangsung secara nyata dan kompleks dalam keseharian. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki TP PKK yang aktif dengan struktur organisasi yang cukup mapan, namun juga menghadapi tantangan yang khas sebagai komunitas pedesaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan perdagangan informal. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa kader-kader PKK di Desa Karangampel menjalankan setidaknya dua lapisan peran secara bersamaan, yaitu peran sebagai kader PKK yang aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat serta peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Selain itu, kader PKK di dalam keluarganya juga sebagai sumber pendapatan sekunder keluarga dengan pekerjaan beragam yaitu sebagai pedagang, wirausaha, guru, dan tenaga kesehatan. Dengan peran yang dijalankan secara bersamaan, dinamika konflik peran ganda yang dialami kader PKK Desa Karangampel menjadi fenomena yang sangat relevan untuk dikaji secara ilmiah dan mendalam.

Meskipun penelitian tentang peran ganda perempuan dan tentang PKK masing-masing sudah cukup banyak dilakukan, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan ketika keduanya dipertemukan secara integratif. Penelitian terdahulu tentang konflik peran ganda perempuan umumnya dilakukan pada konteks profesi formal seperti dosen Qomariyah et al., (2024, hlm. 89-96), petani Jalil & Tanjung (2020, hlm. 58-70), atau karyawan perusahaan Purwanto & Muizu, 2023, hlm. 222-233), namun jarang yang secara khusus menjadikan kader PKK sebagai subjek kajian. Di sisi lain, penelitian tentang PKK umumnya lebih menitikberatkan pada efektivitas program dan kontribusi PKK dalam pembangunan, tanpa menggali secara mendalam pengalaman subjektif kader dalam menyeimbangkan peran sosial dan domestik mereka secara bersamaan. Lebih dari itu, belum ditemukan penelitian yang secara bersamaan mengintegrasikan analisis terhadap dinamika konflik peran ganda kader PKK dari sudut pandang peran pembangunan masyarakat dan peran kehidupan keluarga sekaligus dalam satu kerangka kajian yang komprehensif, khususnya di wilayah pedesaan Jawa Barat seperti Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini secara ilmiah dan mendalam melalui penelitian yang berjudul ***"Dinamika Peran Ganda Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Masyarakat dan Kehidupan Keluarga (Studi pada TP PKK Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis)"***. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kehidupan kader PKK sebagai perempuan yang secara bersamaan mengemban tanggung jawab besar dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan keluarganya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan masalah yaitu: Bagaimana dinamika peran ganda kader PKK dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan keluarga di Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis?

1.3 Definisi Operasional

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka diperlukan penjelasan mengenai definisi operasional dari konsep-konsep utama. Definisi operasional ini berfungsi sebagai batasan konseptual sekaligus pedoman dalam memahami variabel yang diteliti. Dengan adanya definisi operasional, penelitian ini dapat lebih terarah, konsisten, serta memudahkan peneliti maupun pembaca dalam menafsirkan istilah yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian di lapangan.

a. Dinamika Peran Ganda

Dinamika peran ganda muncul ketika terjadi tumpang tindih, beban ganda, maupun sinergi antara peran sosial dan peran domestik. Dinamika peran yang diteliti meliputi strategi pengelolaan waktu, konflik peran, dukungan sosial, dan perubahan identitas sosial. Ruang lingkup pembangunan masyarakat dibatasi pada kegiatan yang difasilitasi TP PKK, seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan program keluarga. Aspek kehidupan keluarga yang dikaji meliputi pengasuhan anak, komunikasi, pembagian tugas rumah tangga, dan dukungan keluarga terhadap aktivitas kader. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana kader PKK mengelola peran sosialnya di masyarakat tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga, serta bagaimana kedua peran tersebut saling memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Peran kader PKK dalam pembangunan masyarakat meliputi kegiatan seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kesehatan melalui posyandu, pendidikan anak usia dini, penyuluhan, serta penguatan peran perempuan dalam masyarakat.

c. Kehidupan Keluarga

Kehidupan keluarga adalah aktivitas, tanggung jawab, dan relasi yang dijalani oleh kader PKK dalam lingkup rumah tangga, meliputi pemenuhan peran

sebagai istri, ibu, pendidik anak, pengelola rumah tangga, serta penjaga keharmonisan keluarga. Dalam penelitian ini, kehidupan keluarga dilihat dari bagaimana peran kader PKK dalam keluarga dipengaruhi oleh aktivitas mereka di masyarakat, serta sebaliknya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui dinamika peran ganda kader PKK dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan keluarga di Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan ini tidak hanya memperkaya wacana akademik tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dalam bidang pendidikan nonformal, pemberdayaan masyarakat, dan studi peran, khususnya dalam konteks peran ganda perempuan. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang dinamika peran sosial dan domestik yang dijalankan oleh kader PKK sebagai agen pembangunan masyarakat dan kehidupan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi fenomenologi, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menekankan pentingnya narasi personal dan pengalaman subjektif dalam memahami realitas sosial perempuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak terkait. Manfaat praktis tersebut antara lain:

a. Bagi Kader PKK

Penelitian ini memberikan refleksi tentang pengalaman nyata yang mereka jalani dalam menjalankan peran ganda. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kader PKK untuk menyeimbangkan peran sebagai agen pembangunan masyarakat dan dalam kehidupan keluarga.

b. Bagi Organisasi PKK/TP PKK

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperkuat program kerja PKK, terutama dalam hal pembinaan kader. Dengan memahami tantangan peran ganda kader, organisasi dapat merancang program yang lebih mendukung, misalnya pelatihan manajemen waktu, pembentukan kelompok dukungan, atau kebijakan internal yang lebih fleksibel.

c. Bagi Pemerintah Desa

Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif gender. Kebijakan yang lahir diharapkan tidak hanya menekankan pada pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kader sebagai pelaksana utama di lapangan.

d. Bagi Masyarakat Desa

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat desa dapat lebih memahami peran strategis kader PKK dalam pembangunan komunitas. Pemahaman tersebut diharapkan menumbuhkan apresiasi dan dukungan yang lebih besar terhadap kader, sehingga tercipta sinergi antara masyarakat, keluarga, dan organisasi PKK.